

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, Januari 2023

Kepala Dinas,



Boy Yandra, SKM.,MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19691110 199403 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	31
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaah Usulan Prpgram dan kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	43
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja	47
4.2 Pendanaan	57
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo) Kabupaten Bangka menyusun Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda
- d. Perumusan Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan”***.

Adapun makna dari tema tersebut adalah menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk lebih difokuskan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembalikan kemandirian sosial masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan lintas sektoral yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan yang berfokus pada pemulihan industri (baik kecil, menengah dan besar), pariwisata dan kemudahan investasi berbasis teknologi informasi, dan penjabaran dari tujuan Dinkominfo Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Diskominfo Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemetintah Daerah
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka;
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22)
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, yaitu :

1. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD.
2. Sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023

Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka adalah penjabaran tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfotik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinkominfotik selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2022 Anggaran Belanja Langsung Dinkominfotik Kabupaten Bangka sebesar Rp.9.252.223.110,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 10

(sepuluh) Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi keuangan sebesar Rp.7.783.662.264,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 84,13%.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Tahun anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar **Rp. 10.343.111.000,00** untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinkominfotik Tahun 2019-2023 dan diperjanjian secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, capaian IKU Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)				Proyeksi (%)
		Standar Nas.		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	indeks e-government			2,5	2,7	-	-	-	2,7	0	-	-	-
2	indeks keterbukaan informasi publik			60	70	-	-	-	60	0	-	-	-
3	Persentase keamanan informasi publik			100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
4	persentase data statistik yang akuntabel			100	100	-	-	-	100	0	-	-	-
5	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi			0	0	44,12	50,00	58,82	0	0	60,53	96,55	100,00

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan gambaran Kinerja Tahun Keempat untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Perubahan Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka pada tahun 2022 tidak mengalami hambatan yang berarti, terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang terpenuhi, bahkan realisasi kinerja melampaui target. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form berikut :

Tabel T.C.29
Rekaputilasi Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2022
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi AKUP Perangkat Daerah	88	17.377.993.529	88	-	88 (73,00)	1.380.319.300	88 (76,15)	-	3.960.983.567	8,00	3.960.983.567	22,79	DIN KOMINFOTIK
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	84.239.864	100	-	100	82.040.900	100,00	-	81.570.099	200,00	81.570.099	0,00	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	-	100	-	100	-	100,00	-	200,00	-	0,00	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dok)	21	33.099.669	7	-	7	53.200.000	100,00	7	52.781.099	14	52.781.099	66,67	109,46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (laporan)	60	51.139.335	20	-	20	25.840.000	100,00	20	25.709.000	40	25.709.000	66,67	56,30
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	12.974.932.883	100	-	100	4.056.671.300	100,00	-	2.840.058.028	200,00	2.840.058.028	21,89	DIN KOMINFOTIK
			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	100	-	100	-	100	-	100,00	-	200,00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12.974.932.883	12	-	12	4.056.671.300	100,00	12	2.840.058.028	24	2.840.058.028	66,67	21,89
			Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (laporan)	114	-	30	-	30	-	100,00	30	-	76	-	66,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100	33.950.000	100	-	100	9.800.000	100,00	-	9.800.000	200,00	9.800.000	28,87	DIN KOMINFOTIK
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stok)	48	33.950.000	16	-	16	9.800.000	100,00	16,00	9.800.000	32,00	9.800.000	66,67	26,67
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	589.007.880	100	-	100	200.470.950	100,00	-	25.899.400	200,00	25.899.400	5,08	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani (bulan)	36	589.007.880	12	-	12	200.470.950	100,00	12	25.899.400	24	25.899.400	66,67	5,08
			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani (bulan)	36	-	12	-	12	-	100,00	12	-	24	-	66,67	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9		10 = 7 + 9		11 = 10/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80	73.000.000	60	-	60	-	37,50	-	97,50	-	0,00	0,00	DIN KOMINFOTIK
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadatkan	3	75.000.000	1	-	0	-	0,00	0,00	1,00	-	33,33	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Anslip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai	100	2.832.868.982	100	-	100	809.060.770	100	848.899.602	200	848.899.602	29,90	29,90	DIN KOMINFOTIK
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi	6	-	2	-	2	-	2	-	4	-			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang dihasilkan (buket)	36	2.060.624.475	12	-	12	644.365.900	100,00	634.480.100	24	634.480.100	66,67	30,67	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang dihasilkan	36	449.132.742	12	-	12	152.583.790	100,00	141.681.722	24	141.681.722	66,67	31,35	
			Jumlah Layanan Updating website yang tertangani (buket)	36	-	12	-	12	-	100,00	12	24	-	66,67		
			Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang Terakumulasi (buket)	36	-	12	-	12	-	100,00	12	24	-	66,67		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor yang dihasilkan	36	314.911.745	12	-	12	72.111.080	100,00	70.757.780	24	70.757.780	66,67	22,47	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	787.906.880	100	-	100	162.277.140	100,00	152.756.438	200,0	152.756.438	19,39	19,39	DIN KOMINFOTIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Beroperasi Dinas	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	33	467.769.200	11	-	11	141.327.140	100,00	135.907.930	22	135.907.930	66,67	25,05	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (buket)	3	89.237.600	1	-	1	20.950.000	100	16.848.500	2	16.848.500	66,67	16,66	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Saranun	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	230.900.000	1	-	1	-	0,00	0,00	1,00	-	33,33	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										81,25	73,62			58,33	25,26	
Predikat Kinerja										T	S			R	SR	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11 = 7 + 10		12 = 14/6 x 100%	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	100	8.552.159.400	100	-	50	2.248.865.340	96,55	2.080.624.821	196,55	2.080.624.821		24,33	DIN KOMINFOTIK	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang Kominfo (%)	98	8.552.159.400	67,14	-	67,14	2.248.865.340	67,14	2.080.624.821	134,28	2.080.624.821		24,33		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat (item)	100	4.525.547.900	500	-	500	167.970.000	303,00	1515	144.302.014	2015	144.302.014	2015		3,19
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1.366.165.000	1	-	1	512.609.240	100	1	506.079.240	2	506.079.240	67		37,19
			Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikasi	9		3		3		66,67	2	-	5	-	56		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemlitmas Komunikasi	Jumlah Kerjasama Media	100	2.660.446.500	30	-	30	1.568.266.100	213,33	64	1.426.243.567	94	1.426.243.567	94	53,66	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										170,75		92,52			957,81	31,35	
Predikat Kinerja										ST		ST			ST	SR	
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	6.798.803.550	44,12	-	50,00	1.551.046.820	96,55	1.508.078.688	140,67	1.508.078.688		22,18	DIN KOMINFOTIK	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK	100	6.798.803.550	100	-	100	1.551.046.820	100,00	1.508.078.688	200,00	1.508.078.688		22,18		
		Penataleaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	5.671.623.550	2,7		3	1.486.666.820	61,67	1,05	1.459.669.969	4,55	1.459.669.969	140,77		25,74
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	1.127.180.000	5		5	64.160.000	120,00	6	48.206.699	11	48.206.699	73		4,26
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90,83		97,23			119,05	15,01	
Predikat Kinerja										ST		ST			ST	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										9.190.231.400		7.549.687.076		7.549.687.076			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)										114,28		82,24			242,06	23,88	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika										ST		T			ST	SR	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2022) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	4	5	6		7		8		9			10		11 = 10/8 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			912.322.700				32.706.650			30.375.600		30.375.600		3,33	
4	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan	58,12	912.322.700	44,12		50,00	32.706.650	96,55		30.375.600	96,55	30.375.600	0,00	3,33	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	912.322.700	100		100	32.706.650	100,00		30.375.600	0,00	30.375.600	0,00	3,33	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	912.322.700	5		5	32.706.650	100,00	0	30.375.600	5	30.375.600	33	3,33	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00		92,87			33,33	3,33	
Predikat Kinerja										ST		ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK										32.706.650		30.375.600		30.375.600			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)										100,00		92,87			33,33	3,33	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik										ST		ST			SR	SR	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN															
5	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	1.092.216.950	44,12		50,00	39.285.000	96,55		36.212.681	96,55	36.212.681	96,55	3,32	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI (Kemampuan)	2	1.092.216.950	1		1	39.285.000	0,00		36.212.681	1,00	36.212.681	1,00	3,32	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assessment (aplikasi)	12	1.092.216.950	4		4	39.205.000	0,00	0	36.212.681	4	36.212.681	33	3,32	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		92,18			33,33	3,32	
Predikat Kinerja										SR		SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN										39.285.000		36.212.681		36.212.681			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)										0,00		92,18			33,33	3,32	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian										SR		ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINKOMINFOTIK										9.252.223.110		7.616.275.357		7.616.275.357			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program DINKOMINFOTIK (%)										86,57		82,32			158,57	15,65	
Predikat Kinerja Seluruh Program DINKOMINFOTIK										T		T			ST	SR	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):																	

*) Ditisi oleh Kepala Bappeda

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2022, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output **Indeks KAMI**, realisasinya tidak ada.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan output **Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan ITSA**, realisasinya tidak ada.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2022, program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
- Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2019 – 2023, secara umum seluruh program / kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian s/d 2022
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Capaian Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	100,00%	100,00%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100,00%	100,00%
III	Program Aplikasi Informatika		
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian s/d 2022
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100,00%	100,00%
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100,00%	100,00%
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100,00%	100,00%

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor Penyebab Berdasarkan uraian pada sub bab 2.1.3, maka dapat diambil kebijakan / tindakan sebagai berikut :

1. Menyusun kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Menyusun kembali penetapan target kinerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran tahun berjalan.

Adapun Tabel Hasil Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d Tahun 2022 Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d Tahun 2022 Kabupaten Bangka

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Profesionalisme Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	21	7	7	7	100	66,67	21	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	60	20	20	20	100	66,67	60	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	66,67	100	100
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (laporan)	114	38	38	38	100	66,67	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	48	16	16	16	100	66,67	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang Tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	66,67	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa	Persentase Arsip Perangkat	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang Dikelola sesuai peraturan (%)								
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	66,67	100	100
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	66,67	100	100
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	66,67	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertangani (unit)	33	11	11	11	100	66,67	100	100
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	1	1	1	100	66,67	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di	98	67,14	67,14	67,14	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Daerah Kabupaten/Kota	bidang Kominfotik (%)								
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat (item)	100	500	500	303	60,6	2015	100	100
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1	1	1	100	67	3	100
	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat (orang)	9	3	3	2	66,67	56	9	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	100	30	213,33	94	44,1	94	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	193	239	58,82	100
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	2,7	3	1,85	61,67	146,77	3,1	100
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	5	5	6	120	73	15	100
PROGRAM PPENYELENGGARAAN	Persentase Layanan	58,12	44,12	50,00	96,55	193	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
STATISTIK SEKTORAL	Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)								
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	5	5	5	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50,00	96,55	96,55	100	100	100
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1	1	0	1	0	1	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assesment (aplikasi)	12	4	4	0	0	33	12	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

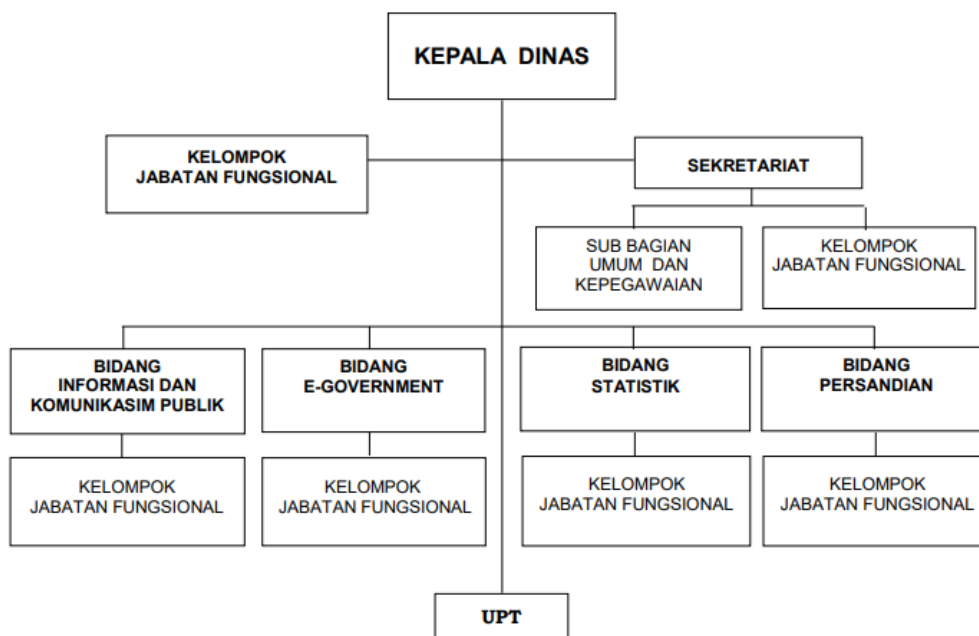
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang e-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

○ **Kepala Dinas :**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.
2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment;
 - b. Menyusun program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan komunikasi, informatika dan statistik
 - e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - f. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, e-goverment;
 - h. Pembinaan pelaksanaan tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment, kesekretariatan, dan pembinaan UPT;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dinas;
 - j. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah- langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - k. Pelaksanaa fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya; dan

○ **Sekretaris :**

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan , membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan

umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;

- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- f. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Penjabaran tugas sekretariat sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusun rencana , program, dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas,
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum dibidang komunikasi, informatika, dan statistik di daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengkoordinasikan dan pengelolaan data informasi, komunikasi, informatika, dan statistik untuk penyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan rencangan rencana strategis (renstra), rencana kerja perangkat daerah (RKPD), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat- menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;

- i. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
- j. Mengkoordinasikan pemberian dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- l. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1. Memyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- 4. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- 6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- 7. Mengendalian surat masuk dan keluar;
- 8. Mengendalikan arsip aktif;

9. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
10. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, kemandirian, kantor dan lingkungan kantor;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
12. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

○ **Bidang informasi dan komunikasi publik :**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas diopini, aspirasi, informasi, dan komunikasi publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi.

Bidang informasi komunikasi publik mempunyai fungsi :

1. Perumusan draf kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media dan komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Pemberian layanan hubungan media;
8. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Bidang informasi dan komunikasi publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.**

● **Bidang e-government**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membimbing pelaksanaan tugas di infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengembangan aplikasi, dan tata kelola e-government.

- **Bidang e-government** mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalin program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
2. Penyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
3. Penyelenggaraan kebijakan program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
5. Pelaksanaan evaluasi program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
6. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
12. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik;
13. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
14. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem daerah cerdas;
15. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
16. Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
17. Pelaksanaan *monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik*;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang e-government** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Bidang statistik**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina

pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisa data statistik sektoral daerah.

Bidang statistik mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
4. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, pengumpulan integrasi pengolahan one data/satu data.
5. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- **Bidang statistik** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Bidang persandian**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- **Bidang persandian** mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
2. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian

3. Penyelenggaraan kebijakan program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
5. Pelaksanan fasilitasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
6. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
7. Pelaksanaan evaluasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.**

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

- Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-kordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu pelayanan kinerja OPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang Profesional di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan. Dengan demikian kinerja pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana keinginan masyarakat.

Selanjutnya, pengukuran persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Sumber : Joko Widodo, 2001 : *Good Governance*

Tabel 2.2 menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, pada Tabel T.C.30 digambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka
Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)			Proyeksi (%)		
		Standar Nas.		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			BB (76,15)	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (76,15)	BB (76,50)	BB (77,00)
2	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE			66,67	83,33	100,00	66,67	83,33	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			78,00	80,00	82,00	78,00	80,00	82,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistic, persandian dan teknologi informatika.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.

- c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
- d. Belum optimalnya pelayanan e-Government.
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah belum layak / belum optimal.
- g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi
- h. Belum optimalnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.
- j. Pengadaan infrastruktur di Bidang TIK, Pembangunan infrastruktur TIK memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinkominfo dalam jangka menengah dan panjang yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap guna terciptanya E-Government (Pemerintah berbasis Elektronik);
- k. Peran KIM yang belum maksimal sehingga mitra pemerintah yang menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat sampai tingkat desa;
- l. Desiminasi infrastruktur pembangunan pemda yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya inovasi selain kegiatan pameran pemda dan media informasi yang belum berbasis TIK;
- m. Masih banyaknya permohonan pengaduan ke komisi informasi yang belum terselesaikan di PPID Pembantu dan pelayanan yang belum berbasis TIK;
- n. Data statistik yang dilaksanakan kerjasama dengan BPS perlu diadakan evaluasi untuk keakuratan datanya dan data statistik yang berbasis website belum terbangun.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfo Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan Internal
 - a) Kekuatan

- 1) Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan e-government. Hal ini ditunjukkan dengan penertiban email perangkat daerah dan optimalisasi penggunaan email tersebut dalam penyampaian informasi, juga mendesak terwujudnya command centre dalam rangka

pengendalian dan percepatan komunikasi dan informasi internal pemerintah kabupaten serta dengan publik;

- 2) Ketersediaan infrastruktur untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung runningnya aplikasi utama di Pemerintah Kabupaten Bangka (e-planning, e-budgeting/sipkd, eperijinan/sipadu, pajak online, dsb).
- 3) Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan e-government.

b) Kelemahan

- 1) Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management hingga ke staff. Top management di setiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.
- 2) Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
- 3) Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masing perangkat daerah seringkali tidak mengkrystal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

b. Lingkungan Eksternal

a) Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya menembus proses kerja yang ada di birokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini belum tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.

3) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan menjadi bagian utama system pemerintahan eletronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.

b) Ancaman/Tantangan

- 1) Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai- nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan public.
- 2) Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap pentingnya integrasi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka kedepannya.
- 3) Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/system informasi tersebut.

2.4 Review Terhadap RKPD

2.4.1. Proses yang dilakukan

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2024 pada Renstra 2024-2026 dengan rancangan akhir Renja 2024 (Permendagri nomor 90 tahun 2019).

2.4.2. Penjelasan mengenaialasan proses yang dilakukan

Dalam melakukan review terhadap Rancangan awal Renja 2024 dengan Permendagri 90 tahun 2019 adalah :

- a. Membandingkan antara rancangan awal Renja 2024 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2024 (Permendagri 90/2019)
- b. Melakukan Pemetaan Program dan indicator program
- c. Melakukan pemetaan Kegiatan dan indicator program
- d. Melakukan pemetaan Sub Kegiatan dan indicator Sub Kegiatan
- e. Melakukan pemetaan Rekening Program dan kegiatan yang lama dan rekening baru

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.

Setelah melakukan pemetaan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2024 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2024 (Permendagri 90/2019) pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dapat disajikan tabel T.C 31 berikut ini.

Tabel T.C 31
Review terhadap RKPD tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

RKPD TAHUN 2024				RENJA 2024				Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		
		Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	1	2	3	4	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.787.943.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.147.746.980	
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	29	27.994.835		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	29	15.000.000	
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10	20.000.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.994.835	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	
	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	16.994.945		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	15.000.000	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	10.999.890		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	10.999.890	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	16.994.945	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	15.000.000	
	Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam	0%	4.311.911.230		Persentase temuan pengelolaan keuangan	0%	3.919.919.300	

	<i>LHP BPK-RI</i>				<i>dalam LHP BPK-RI</i>			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.311.911.230	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.919.919.300	
	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%			Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%		
	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	4.311.911.230		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	3.919.919.300	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	4.311.911.230		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	3.919.919.300	
	<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>4,25</i>	<i>1.137.179.615</i>		<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>4,25</i>	<i>1.030.067.680</i>	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.436.815	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			891.587.650	
	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%			Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%		
	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	941.436.815		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	891.587.650	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	687.524.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	648.853.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	149.258.615	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	142.526.650	
	Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	104.653.450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.207.500	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.742.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			138.480.030	
	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	195.742.800		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.480.030	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	195.742.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	138.480.030	
	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan		
	<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	1.185.108.000		<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	162.760.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		
	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	800.000.000		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	500.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.108.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162.760.000	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	385.108.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	162.760.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	155.452.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	141.320.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	29.656.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	21.440.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	-	
	<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat</i>	67	125.750.000		<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup</i>	67	-	

	Daerah				Perangkat Daerah			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.750.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	125.750.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	48.750.000		Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	16 Stel	12.000.000		Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	66 Stel	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	-	
	Indeks SPBE	3,1			Indeks SPBE	3,1		
		10				10		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.441.662.500	
	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	3.500.000.000		Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	1.441.662.500	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.500.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.441.662.500	
	Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	3.500.000.000		Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	1.441.662.500	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	1.000.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	173.216.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sapras yang tersedia	1 Paket	500.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sapras yang tersedia	1 Paket	450.495.000	
	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang			Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	2.000.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	817.951.500	
	Jumlah KIM	25 KIM			Jumlah KIM	25 KIM		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.530.035.820	

	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	3.000.000.000		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	1.530.035.820	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.530.035.820	
	Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	3.000.000.000		Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	1.530.035.820	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	2.500.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	1.465.875.820	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	500.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	64.160.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			425.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			27.706.650	
	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	425.000.000		Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	27.706.650	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			425.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			27.706.650	
	Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	425.000.000		Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	27.706.650	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	27.706.650	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	1 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	5 Data	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			36.700.000	
	Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan	40,00%	500.000.000		Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan	40,00%	36.700.000	

	Terstandarasi				Terstandarasi			
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			36.700.000	
	Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	500.000.000		Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	36.700.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	36.700.000	
			14.212.943.680				8.183.851.950	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Proses penjangkaran usulan masyarakat dimulai dari musrenbang kecamatan, forum PD dan musrenbang Kabupaten, terdapat satu usulan dari masyarakat yang telah diakomodir dalam Renja Dinas Kominfotik sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel T.C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</p>	Desa Petaling, Kec. Mendo Barat	<p>Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE</p> <p>Nilai domain kebijakan internal</p> <p>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</p>	Rp. 50.000.000	Penambahan Jaringan Hotspot

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan Tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Dinkominfotik sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Bangka Tahun 2024

Nasional	Prov.Kep.babel	Kab.Bangka
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.	- Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah	- Pembangunan pariwisata, pertanian, perikanan, agroindustri dan UMKM
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM	- Pembangunan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang berkeadilan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan descent job	- Peningkatan partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan	- Penguatan infrastruktur dan konektivitas akses perekonomian
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	- Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan antar masyarakat	- Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi
5. Revitalisasi industri dan	- Pembangunan Sosial	- Peningkatan kualitas
	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya	

<p>penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas</p> <p>6. Ekonomi hijau</p> <p>7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi</p>	alam	lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
---	------	---

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berpedoman pada RKPD Kab.Bangka, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024, RKP Tahun 2024; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kep.Babel 2005–2025, RPD Provinsi Kep.Babel 2023–2026, RKPD Provinsi Kep.Babel 2024; dan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka 2024.

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatika 3 (tiga) tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2024—2026 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;

- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinkominfotik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel
- 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi
- 3) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;

- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinkominfo dan Telekomunikasi maupun Pemkab Bangka.

Program dan kegiatan dimaksud oleh Dinkominfo dan Telekomunikasi Kab. Bangka telah disusun yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

III. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1..Rencana Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kab.Bangka

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.941.697.010,00	APBD			6.137.905.710,00
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		29,00	204.324.220,00			29,53	204.324.220,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		12,75				13,00	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		0,00	4.152.307.000,00			0,00	4.152.307.000,00
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		68,00	131.400.000,00			70,00	60.350.000,00
		Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah		3,90	373.285.160,00			4,00	383.285.160,00
		Persentase BMD		1,00				1,00	

		Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik			1.080.380.630,00				1.337.639.330,00
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	204.324.220,00			100%	204.324.220,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	17 dokumen	138.224.220,00			6 dokumen	138.224.220,00
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	12 laporan	66.100.000,00			4 laporan	66.100.000,00
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100%	4.152.307.000,00			100%	4.152.307.000,00
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	26 orang/bulan	4.120.257.000,00			26 orang/bulan	4.120.257.000,00
2.16.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		900 dokumen	10.000.000,00			950 dokumen	10.000.000,00
2.16.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	18 laporan	22.050.000,00			12 laporan	22.050.000,00
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Kab. Bangka	18%	131.400.000,00			18%	60.350.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat		100%				100%	

		waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik							
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	80.800.000,00	APBD		1 paket	9.750.000,00
2.16.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		1 Dokumen	10.000.000,00			1 Dokumen	10.000.000,00
2.16.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 orang	40.600.000,00			26 orang	40.600.000,00
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	373.285.160,00			100%	383.285.160,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3				3	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	347.835.160,00			12 laporan	357.835.160,00
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	10.000.000,00			1 Dokumen	10.000.000,00
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	15.450.000,00			12 dokumen	15.450.000,00
2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	80%	169.350.000,00			80%	429.557.535,00
2.16.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau		5 unit kendaraan roda 2 (dua)	10.000.000,00			5 unit kendaraan	138.980.000,00

	Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan						roda 2 (dua)	
2.16.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		1 paket	109.950.000,00			1 paket	182.230.000,00
2.16.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		5 unit	19.400.000,00			-	-
2.16.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	10.000.000,00			-	-
2.16.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100 unit	10.000.000,00			-	-
2.16.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		4 unit	10.000.000,00			2 unit	108.347.535,00
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100%	674.801.490,00			100%	671.852.655,00
2.16.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	421.800.435,00			12 Laporan	421.800.435,00
2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	173.150.450,00			12 Laporan	173.150.450,00
2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	79.850.605,00			12 Laporan	76.901.770,00

2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%		236.229.140,00			100%	236.229.140,00
2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka	12 unit	174.657.140,00			12 unit	174.657.140,00
2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	31 Unit	36.572.000,00			40 Unit	36.572.000,00
2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	25.000.000,00			1 Unit	25.000.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100%		1.697.241.760,00	APBD		100%	1.727.241.670,00
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75	1.697.241.760,00			85	1.727.241.670,00
02.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	Kab. Bangka	100%	852.566.100,00			100%	882.566.010,00
02.16.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	4 dokumen	10.000.000,00			4 dokumen	10.000.000,00

	Publik								
02.16.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	36 dokumen	10.000.000,00			36 dokumen	10.000.000,00
02.16.02.2.01.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Bangka	67 Layanan	10.000.000,00			70 Layanan	10.000.000,00
02.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Bangka	67 Dokumen	822.566.100,00			70 dokumen	852.566.010,00
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti		100%	270.125.000,00			100%	270.125.000,00
02.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bangka	12 dokumen	270.125.000,00			12 dokumen	270.125.000,00
		Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media		100%	29.590.000,00			100%	29.590.000,00
02.16.02.2.01.09	Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Bangka	4 dokumen	29.590.000,00			4 dokumen	29.590.000,00
		Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia		100%	10.000.000,00			100%	10.000.000,00
02.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	2 unit	10.000.000,00			2 unit	10.000.000,00
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi		25%	534.960.660,00			50%	534.960.660,00
02.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangka	2 orang	534.960.660,00			2 orang	534.960.660,00

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.401.880.000,00	APBD			2.401.880.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)		100,00%	2.401.880.000,00			100,00%	2.401.880.000,00
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE		66,67	302.429.980,00			83,33	302.429.980,00
		Nilai DomainTata Kelola SPBE		3 Nilai	10.000.000,00			4 Nilai	10.000.000,00
		Nilai Domain Layanan SPBE		3 Nilai	207.509.980,00			4 Nilai	207.509.890,00
02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrstruktur TIK dalam kondisi baik	Kab. Bangka	85	2.099.450.020,00			90	2.099.450.020,00
02.16.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	1 unit	2.099.450.020,00			1 unit	2.099.450.020,00
02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal	Kab. Bangka	3 Nilai	84.920.000,00			4 Nilai	84.920.090,00
02.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	12 dokumen	54.920.000,00			12 dokumen	54.920.090,00
02.16.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem	Kab. Bangka	12 dokumen	10.000.000,00			12 dokumen	10.000.000,00

	<i>Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>							
02.16.03.2.02.08	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>5 layanan publik</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>5 layanan publik</i>	<i>10.000.000,00</i>
02.16.03.2.02.03	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>1 unit</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>1 unit</i>	<i>10.000.000,00</i>
02.16.03.2.02.05	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>1 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>
02.16.03.2.02.07	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>5 unit</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>5 unit</i>	<i>10.000.000,00</i>
02.16.03.2.02.07	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>197.509.980,00</i>			<i>5 aplikasi</i>	<i>197.509.890,00</i>
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				166.370.230,00				166.370.230,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				166.370.230,00	APBD			166.370.230,00
		Persentase Data Sektoral yang terintegrasi		58,82%	166.370.230,00			79,41%	166.370.230,00
		Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi		25,00	38.567.140,00			50,00	38.567.140,00
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	Kab. Bangka	58,82%	127.803.090,00			79,41%	127.803.090,00

	Kabupaten/Kota								
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bangka	1 dokumen	65.930.000,00			1 dokumen	65.930.000,00
2.20.02.2.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Bangka	34 dokumen	61.873.090,00			34 dokumen	61.873.090,00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Bangka	1 orang	28.567.140,00			1 orang	28.567.140,00
2.20.02.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Bangka	34 PD	10.000.000,00			34 PD	10.000.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				386.628.624,80				386.628.624,80
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				135.922.000,00	APBD			145.922.090,00
		Indeks KAMI		Kematangan 1	135.922.000,00			Kematangan 1	145.922.090,00
		Nilai Kematangan Indeks KAMI		Kematangan 1	10.000.000,00			Kematangan 1	10.000.000,00
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kab. Bangka	Kematangan 1	125.922.000,00			Kematangan 1	135.922.090,00
2.21.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	2 Laporan	10.000.000,00			2 Laporan	10.000.000,00

	<i>Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>							
2.21.02.2.01.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	<i>Kab. Bangka</i>	34 orang	115.922.000,00			34 orang	125.922.090,00
2.21.02.2.02.01	<i>Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	<i>Kab. Bangka</i>	34 perangkat daerah	10.000.000,00			34 perangkat daerah	10.000.000,00
JUMLAH					10.343.111.000,00				10.579.319.700,00

4.2..Pendanaan

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp.10.343.111.000,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan”***, dan penjabaran dari tujuan Dinkominfo Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu ***“Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi”*** dan ***“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data”***.

Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinkominfo yang telah dituangkan dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Dinkominfo adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi”*** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkominfo dan Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2024 Dinkominfo akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp.10.343.111.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinkominfo dan lingkup Kabupaten Bangka.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan reviu kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penjadwalan, factor pendukung maupun faktor penghambat.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2024 ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.